

**PENERAPAN NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR  
MELALUI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN  
(Suatu Penelitian Pada SMA Negeri 1 Mila Pidie)**

**Halik**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Jabal Ghafur

**Abstract**

This research entitled "Application of Democratic Values in Teaching and Learning Process in SMA Negeri 1 Mila Pidie" formulation of the problem; 1) How is the application of democratic values in the teaching and learning process of Civic Education subjects ?, 2) What are the barriers experienced by teachers in applying democratic values in the learning process ?. Research purposes; 1) to know the application of democratic values in teaching and learning process of Civic Education subjects, and 2) to know the obstacles faced by teachers in applying democratic values. This study used descriptive qualitative method. The population of this study is all teachers of Civic Education. using sampling sampling, data collection Observations and in-depth interviews. The results of this study indicate that the application of democratic values in teaching and learning process subjects of Civic Education has been done well by teachers, although there are obstacles experienced by teachers. The conclusion of the researcher are: 1) Application of democratic values; tolerance, cooperation, and consensus, striving to maintain differences, fostering friendship among students, developing mutual understanding of each other, and teaching openness and dialogue, applying diversity values through lecture models and discussions about cultural riches. 2) Obstacles experienced by teachers of this application is the method of teaching and learning that is used for example; a lecture model that can bore students, material democracy is vast. Suggestion; a) To the teacher in the teaching and learning process always prioritize the values of democracy, so that the learning process can be used as a guide to a more effective and efficient. b) To the students in terms of teaching and learning process for the application of democratic values to be more pro-active to implement in taking a decision, policy, resolve conflict, and the achievement of learning objectives and can improve student learning achievement.

**Keywords:** Implementation, Values, and Democracy.

**Latar belakang Masalah**

Dewasa ini lebih banyak negara menggunakan sistem yang berlaku dalam memenej negaranya adalah sistem "Demokrasi"... Oleh sebab itu demokrasi sistem pendidikan nasional di Indonesia, sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan "bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Artinya setiap orang memiliki kebebasan untuk memperoleh pendidikan dalam rangka mengembangkan diri dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan".

Demokrasi yang tertuang dalam UUD 1945 mengakui adanya kebebasan dan persamaan hak dan kedudukan sebagai warga negara, juga mengakui perbedaan serta keanekaragaman mengingat Indonesia adalah "Bhineka Tunggal Ika". Menurut pasal UUD

1945 pasal 28 (2015:21) disebutkan bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Oleh sebab itu unsur-unsur kemerdekaan berserikat dan berkumpul tersebut, mengeluarkan pikiran atau pendapat maka demokrasi meng-andung ciri yang merupakan patokan bahwa warga negara dalam hal tertentu dapat membuat keputusan-keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin termasuk presiden dan wakil presiden.

Model demokrasi di Indonesia tidak saja tercermin dari rakyat untuk rakyat, tetapi lebih dari itu seperti toleransi, kerjasama dan mufakat juga merupakan bagian dari demokrasi. Semua nilai-nilai demokrasi tersebut ada dipelajari dari

berbagai mata pelajaran seperti sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, olahraga, Pendidikan Ke-warganegaraan dan bahkan IPA (matematika, fisika, kimia dan biologi) juga mengajar sifat kejujuran dan toleransi pada siswa.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang paling dominan mengajarkan anak didiknya untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian secara substantif dan pedagogis didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan.

Sebab itu Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia ditempatkan sebagai salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “value-based education”. dalam era global Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia mengemban misi sebagai pendidikan demokrasi atau Civic Education for democracy.

Pendidikan Kewarganegaraan mengkaji konsep besar akibat pengaruh globalisasi, yakni demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan menempatkan hukum di atas segalanya yang didasarkan pada fondasi sepuluh pilar demokrasi yang menjadi dasar pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang baru.

Secara konseptual, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu bentuk pendidikan yang memuat unsur-unsur pendidikan demokrasi yang berlaku universal, di mana prinsip-prinsip umum demokrasi yang mengandung pengertian mekanisme sosial politik yang dilakukan melalui prinsip dari, oleh, dan untuk warga negara menjadi fondasi dan tujuannya.

Oleh sebab itu tujuan Pendidikan Kewarganegaraan untuk membangun kesadaran peserta didik terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mampu menggunakannya secara demokratis. Untuk itu penerapan nilai-nilai demokratis di sekolah harapannya untuk menghadapi era globalisasi yang kini diyakini akan menghadirkan banyak perubahan global seiring dengan akselerasi keluar masuknya berbagai kultur dan peradaban baru dari berbagai bangsa di dunia. Itu artinya, dunia pendidikan dalam mencetak sumber daya manusia yang bermutu dan profesional harus menyiapkan generasi yang demokratis, sehingga memiliki resistensi yang kokoh di tengah-tengah konflik peradaban.

Adapun temuan awal penelitian ini penerapan nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Mila Pidie belum menunjukkan hasil yang memuaskan, disebabkan oleh model pelaksanaannya yang kurang tepat, dan media yang digunakan kurang bervariasi, hal itu menyebabkan nilai-nilai demokrasi yang diperoleh siswa-siswi belum memenuhi harapan.

Sementara itu hakikat yang sebenarnya penggunaan media dan strategi pembelajaran dapat memperluas dan memperjelas kemampuan siswa untuk merasakan, mendengar dan melihat dalam batas jarak ruang tertentu. Kenyataannya ada sebagian guru dalam proses pembelajaran yang belum paham teknik penerapan nilai-nilai demokrasi, inilah yang jadi pembelajaran kurang menyenangkan, sehingga nilai-nilai demokrasi kurang mendapat respon dari siswa-siswi, oleh sebab itu, peneliti menaruh minat terhadap tema penelitian ini; penerapan nilai-nilai demokrasi dalam proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Mila Pidie menarik untuk diteliti.

### **Rumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang diuraikan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan nilai-nilai Demokrasi dalam proses belajar mengajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?
2. Kendala apa saja yang dialami guru dalam penerapan nilai-nilai demokrasi pada proses belajar mengajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?

### **Manfaat Penelitian**

Penerapan nilai-nilai demokrasi dalam proses belajar mengajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat bermanfaat untuk :

1. Guru bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya tentang penerapan nilai-nilai demokrasi dalam proses belajar mengajar (pembelajaran) yang lebih baik.
2. Sekolah agar memperhatikan kualitas dan profesionalisme guru, khususnya pada proses penerapan nilai-nilai demokrasi dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

3. Peneliti untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam proses penelitian lapangan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

### Hasil penelitian

#### 1) Penerapan Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Proses Belajar Mengajar Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Penerapan nilai demokrasi seperti toleransi, kerjasama dan mufakat sangat diutamakan dalam proses pembelajaran demokrasi di SMA Negeri 1 Mila Pidie. Hasil wawancara dengan guru-guru mengatakan bahwa penerapan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, kerjasama dan mufakat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka langsung.

Mengingat dalam proses pembelajaran siswa terdiri dari berbagai watak dan perilaku ada yang penyabar fitna, egois dan bahkan ada yang keras wataknya, seperti berbeda budaya, suku dan bahkan agama. wajah multikultural tersebut sekolah dapat disebut sebagai lembaga pluralis, salah satu bagian penting dari tata kehidupan yang pluralis yakni ditandai kemajemukan agama, budaya, dan etnis.

Oleh sebab itu guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Mila Pidie mengungkapkan bahwa penerapan nilai toleransi kerjasama, dan mufakat dilakukan yaitu: a) Berusaha membentuk pendidikan alternatif. Yaitu suatu bentuk pendidikan yang berusaha menjaga perbedaan antar siswa dan mengajarkan kepada mereka untuk menumbuhkan akan tata nilai dan prinsip-prinsip kebersamaan, b) Memupuk persahabatan antara siswa yang beraneka ragam tersebut, c) Mengembangkan sikap saling memahami satu sama lain, d) Mengajarkan keterbukaan dan dialog dalam diskusi kelas, menyelesaikan tugas-tugas kelompok secara bersama-sama.

wawancara dengan guru Pendidikan Kewarganegaraan menyebutkan bentuk pendidikan toleransi, kerjasama dan mufakat yang ditawarkan kepada siswa antara lain; a) Sebagai instrumen penting dalam penanaman nilai kebersamaan. Sebab, "pendidikan" sampai sekarang diyakini mempunyai peran besar dalam membentuk karakter setiap individu yang dididiknya dan mampu menjadi petunjuk penerang bagi generasi muda, terlebih melalui pendidikan kewarga-negaraan, dan b) Sebagai media penyadaran siswa untuk membangun sikap toleran, kerjasama dan mufakat demi terciptanya harmonisasi antar siswa-siswi untuk

dijadikan kebutuhan bersama dalam proses pembelajaran. wawancara dengan guru; penerapan demokrasi seperti nilai toleransi, kerjasama dan mufakat dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut. a) Meningkatkan nilai toleransi, kerjasama dan mufakat dengan cara membangun kebera-gamaan peserta didik untuk tidak memper-masalahkannya. b) Memberikan kemungkinan keterbukaan untuk mempelajari dan tidak mempermasalahakan orang lain sebatas untuk menumbuhkan sikap toleransi, kerjasama dan mufakat. c) Berdiskusi harus menghormati dan toleransi terhadap pendapat orang lain walau pendapat itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Hasil wawancara tersebut jelas bahwa dengan guru di SMA Negeri Mila Pidie telah menerapkan nilai-nilai toleransi, kerja-sama dan mufakat dalam proses pembelajaran dan merupakan bagian integral dari pendidikan pada umumnya dan berfungsi untuk membantu perkembangan paham-paham demokrasi.

wawancara lain dengan guru terkait dengan penerapan nilai-nilai toleransi, kerjasama dan mufakat memberikan pengertian yang dibutuhkan bagi orang-orang yang berbeda perilaku, budaya, agama dan suku. Artinya Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk mengeksplorasi sifat dasar pendidikan demokrasi. Wawancara dengan guru menyebutkan bahwa pembelajaran toleransi, kerjasama dan mufakat melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan akan mampu: a) Mewujudkan jalan menuju kehidupan secara personal dan sosial. b) Pembelajaran dapat menjadi cerminan dapat mempraktekkan sesuatu yang telah diajarkannya. c) Lingkungan sekolah tersebut dapat dijadikan percontohan oleh murid-murid.

Dengan penanaman nilai pendidikan toleransi, kerjasama dan mufakat di dalam sekolah, peserta didik dapat mempelajari adanya kurikulum-kurikulum umum di dalam kelas-kelas heterogen. Hal ini diperlukan dalam proses pembelajaran demokrasi di sekolah. Hasil wawancara dengan guru penerapan nilai toleransi, kerjasama dan mufakat untuk: a) Guna mendorong adanya persamaan ideal, b) Membangun perasaan persamaan, dan c) Memastikan adanya input dari peserta didik yang memiliki latar belakang berbeda. Hasil wawancara dengan guru bahwa penerapan nilai toleransi, kerjasama dan mufakat memiliki nilai strategis dalam pembelajaran. Tanpa pembelajaran yang difokuskan pada pengembangan perspektif multikultural dalam

kehidupan anak didik adalah tidak mungkin untuk menciptakan keberadaan aneka ragam budaya di masa depan dalam masyarakat Indonesia.

Dengan sistem pendidikan toleransi, kerjasama dan mufakat ini akan berusaha memelihara dan berupaya menumbuhkan pemahaman yang inklusif pada peserta didik. Dengan suatu orientasi untuk memberikan kesadaran terhadap para siswa akan pentingnya saling menghargai, menghormati dan bekerja sama dengan agama-agama lain. wawancara dengan guru pentingnya pendidikan toleransi, kerjasama dan mufakat ini untuk: a) Agama, suku bangsa dan tradisi, secara aktual merupakan ikatan yang terpenting dalam kehidupan siswa. Bagaimanapun juga hal itu akan menjadi perusak kekuatan masyarakat yang harmonis ketika hal itu digunakan sebagai senjata politik atau fasilitas individu-individu atau kelompok ekonomi. Di dalam kasus ini, agama terkait pada etnis atau tradisi kehidupan dari sebuah masyarakat. Masing-masing individu telah menggunakan prinsip agama untuk menuntun dirinya dalam kehidupan di masyarakat, tetapi tidak berbagi pengertian dari keyakinan agamanya pada pihak lain. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pendidikan multikultural untuk mencapai tujuan dan prinsip siswa dalam menghargai agama. b) Kepercayaan merupakan unsur yang penting dalam kehidupan bersama. Dalam masyarakat yang plural selalu memikirkan resiko terhadap berbagai perbedaan.

Untuk itu munculnya resiko dari kecurigaan/ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap yang lain dapat juga timbul ketika tidak ada komunikasi di dalam masyarakat, dan c) Toleransi, kerjasama dan mufakat merupakan bentuk tertinggi, bahwa kita dapat mencapai keyakinan. Toleransi, kerjasama dan mufakat dapat menjadi kenyataan ketika kita mengasumsikan adanya perbedaan. Keyakinan adalah sesuatu yang dapat diubah. Sehingga dalam toleransi, kerjasama dan mufakat tidak harus selalu mempertahankan keyakinannya, pendapatnya. Untuk mencapai tujuan sebagai manusia Indonesia yang demokratis dan dapat hidup di Indonesia diperlukan pendidikan multikultural. Penerapan nilai toleransi, kerjasama dan mufakat yang diterapkan oleh guru dalam pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang berbeda secara kultural mengarahkan atau mendorong siswa memiliki perasaan positif, mengembangkan konsep diri, mengembangkan

toleransi, kerjasama dan mufakat dan mau menerima orang lain. Guru berupaya menciptakan arena belajar dalam satu kelompok budaya.

## 2) Penerapan Unsur-Unsur Keberagaman dalam Pembelajaran.

Penerapan unsur-unsur keberagaman dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Mila Pidie dilakukan dengan cara penyampaian tujuan pembelajaran. Langkah penyampaian tujuan pembelajaran dimaksudkan untuk memastikan kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran. Selain itu juga disampaikan item-item materi yang akan dipelajari, dan aktivitas siswa dalam mencapai tujuan tersebut. Guru menyuruh antar siswa untuk berdiskusi. Dalam diskusi siswa membahas tentang Keberagaman Budaya.

Melalui keberagaman budaya yang diajarkan, maka melahirkan satu persepsi tentang: a) Kekayaan budaya ini merupakan aset kekayaan bangsa dan sekaligus mewarnai kesatuan bangsa yang ditandai dengan mottonya, bhineka tunggal ika. b) Keragaman budaya yang merupakan aset kekayaan bangsa Indonesia ini, perlu dikenalkan kepada generasi muda, para siswa, melalui pengajaran, khususnya pengajaran Pendidikan Kewarga-negaraan yang memuat nilai-nilai demokrasi, dan c) Dalam diskusi tersebut juga dibahas gejala disintegrasi bangsa yang akhir-akhir ini memperlihatkan dampak negatif terhadap kesatuan dan persatuan bangsa yang telah dihasilkan oleh para pendahulu bangsa ini. Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan para siswa-siswi di SMA Negeri 1 Mila Pidie jelas memperlihatkan unsur-unsur keberagaman menjadi konteks yang utama dibahas jangan ada sikap saling memusuhi antar suku, saling mencurigai, dan saling tidak menghargai budaya orang lain, merupakan gejala yang mempertajam disintegrasi bangsa.

wawancara dengan guru terhadap penerapan unsur-unsur keberagaman dalam proses pembelajarannya adalah: a) Mengenalkan kepada para siswa sebagai generasi penerus bangsa tentang keragaman budaya bangsanya. b) Dengan mengenalkan keragaman budaya bangsanya diharapkan kelak ia akan saling menghargai dan menghormati budaya-budaya di luar budaya masyarakatnya sendiri, dan c) Pengenalan budaya masyarakat yang tidak individualis, penuh kebersamaan merupakan cara pemupukan kepribadian bagi siswa sebagai

generasi muda yang akan menyandang bangsa Indonesia di masa datang yang penuh tantangan. Penerapan unsur-unsur keberagaman yang diajarkan di SMA Negeri 1 Mila Pidie dilakukan untuk mendidik siswa menjadi orang yang mau menerima orang lain walau ada perbedaan. Pembelajaran unsur-unsur keberagaman dalam proses pembelajaran di sekolah untuk membawa kualitas perilaku kebangsaan yang khas-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang.

wawancara dengan guru cara-cara menerapkan unsur-unsur keberagaman dalam proses pembelajaran dilakukan dengan: a) Proses pembelajaran tatap muka langsung untuk menentukan perilaku kolektif kebangsaan bagi yang khas-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI, b) Melalui tugas-tugas yang diberikan guru untuk memberikan hak dan kewajiban, mau mengambil tanggung jawab dalam setiap tugas-tugas kelompok dan tugas individu, dan c) Tugas-tugas tersebut dikerjakan secara bersama-sama tidak memandang yang satu bodoh dan yang satu pandai, tetapi dalam kelompok itu kedudukannya sama.

Oleh sebab itu, pembelajaran unsur-unsur keberagaman melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Mila Pidie diusahakan untuk memantapkan nilai-nilai demokrasi dalam setiap pemecahan masalah yang dilakukan secara bersama-sama. Pendidikan demokrasi merupakan salah satu misi yang harus diemban.

Misi lain adalah sebagai pendidikan politik/pendidikan, pendidikan hukum, pendidikan HAM, dan bahkan sebagai pendidikan anti korupsi. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi sebagai ujung tombak dalam menerapkan unsur-unsur keberagaman dalam proses pembelajaran untuk menghilangkan adanya sikap egoisme. Pada prinsipnya pendidikan unsur-unsur keberagaman yang diajarkan guru pada SMA Negeri 1 Mila Pide telah dijadikan sebagai sasaran pembelajaran. Perubahan persepsi peserta didik merupakan usaha yang direncanakan, bukan sekedar dampak pengiring. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa komponen Pendidikan

Kewarganegaraan adalah penge-tahuan ketrampilan dan demokrasi telah menjadi wacana utama masing-masing guru Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah. Dengan kata lain tanpa ada kebijakan peng-integrasian pendidikan demokrasi ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan, maka jangan diharapkan mata pelajaran yang lain dapat mengimplementasikannya.

wawancara lain disebutkan bahwa guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Mila Pidie berkomitmen untuk senantiasa mengutamakan unsur-unsur keberagaman dalam proses pembelajaran. Lebih-lebih dengan adanya kebijakan pengembangan nilai-nilai demokrasi yang terintegrasi di dalamnya, ini merupakan tantangan untuk menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai ujung tombak yang tajam bagi pendidikan demokrasi. Wawancara dengan guru bahwa pembelajaran unsur-unsur keberagaman dalam setiap pembelajaran selalu diutamakan. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi dapat dikenali dari konsep, tujuan, fungsi, tuntutan kualifikasi dan keunikan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan adalah pembelajaran yang mengugah rasa ingin tahu dan kepercayaan terhadap norma-norma sosial yang mengatur hubungan personal dalam masyarakat sebagaimana mengatur partisipasi politik.

Berdasarkan wawancara di atas, jelas bahwa pembelajaran unsur-unsur keberagaman dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tentang demokrasi “merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.”

Wawancara lain dengan guru Pendidikan Kewarganegaraan menyebutkan bahwa pembelajaran unsur-unsur keberagaman yang diterapkan selama ini bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan untuk: a) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; b) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi; dan c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-

karaktermasyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya;

Oleh sebab itu, fungsi Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembelajaran unsur-unsur keberagaman adalah wahana untuk membentuk dan mengakui hak-hak orang lain, hidup penuh dengan nuansa toleransi dan tidak menganggap orang lain jelek, bodoh, kolot dan sebagainya. Dalam wawancara dengan guru Pendidikan Kewarganegaraan menyebutkan bahwa dalam menerapkan unsur-unsur keberagaman dalam proses pembelajaran guru harus memiliki kompetensi guru khusus meliputi: a) Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. b) Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan; c) Nilai dan sikap kewarganegaraan, dan ketrampilan kewarganegaraan; dan d) Menunjukkan manfaat mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Oleh sebab itu memahami, menghayati, konsensus, dan menerapkan nilai-nilai budi pekerti, demokrasi, hak asasi manusia dan nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari itulah pembelajaran demokrasi yang ada dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

### 3) Pola Penyelesaian Konflik Antar Siswa

Adapun pola penyelesaian konflik antar siswa di SMA Negeri 1 Mila Pidie sebagaimana wawancara berikut ini; a) Mengakui adanya konflik. Langkah ini merupakan langkah awal untuk menyelesaikan konflik secara dini. b) Tanpa adanya pengakuan secara sadar bahwa telah terjadi konflik maka masalah tidak akan pernah terselesaikan. Kearifan dari semua pihak sangat diperlukan dalam proses ini, dan c) Mengidentifikasi konflik yang sebenarnya. Siswa dapat menyebutnya sebagai identifikasi masalah. Kegiatan ini sangat diperlukan dan memerlukan keahlian khusus. Konflik dapat saja muncul dari sumber atau akar masalah tertentu, namun masalah tersebut menjadi konflik bila tidak dikelola dengan emosi yang baik.

wawancara tersebut jelas bahwa menyelesaikan suatu konflik di antara siswa, guru perlu memilah mana yang menjadi masalah inti dan mana yang menjadi masalah karena hal-hal emosional. Masalah inti merupakan masalah yang mendasari terjadinya konflik sedangkan

emosi hanya memperkeruh masalah itu saja. Hasil wawancara dengan guru bahwa penyelesaian konflik antara siswa dalam proses pembelajaran dilakukan dengan pola sebagai berikut; a) Mendengarkan semua pendapat atau sudut pandang dari siswa yang terlibat, b) Menghindari keberpihakan pada siswa-siswa tertentu. bersikaplah yang jujur dalam menyelesaikan masalah siswa, dan c) Memberi nasihat bagi siswa bersalah dan tidak mengulangi perbuatannya. Siswa yang ber-salah harus meminta maaf kepada temannya atas persetujuan guru.

Oleh sebab itu pola penyelesaian konflik antar siswa-siswi di SMA Negeri 1 Mila Pidie telah memfokuskan pembicaraan pada fakta dan perilaku, bukan pada perasaan atau unsur-unsur personal/pribadi, sehingga setiap konflik dapat diselesaikan dengan baik. Wawancara lain dengan guru Pendidikan Kewarganegaraan menyebutkan bahwa: 1) Penyelesaian konflik antara siswa dilakukan bersama-sama mencari cara terbaik untuk menyelesaikan konflik, b) Melakukan diskusi terbuka untuk memperluas wawasan dan informasi serta alternatif solusi untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan hubungan yang sehat di antara semua yang terlibat konflik.

Selain itu konfirmasi tersebut telah membuktikan bahwa guru-guru di SMA Negeri 1 Mila Pidie telah menyelesaikan konflik antar siswa-siswi dilakukan dengan model: a) Musyawarah dan mufakat; b) Mendapatkan kesepakatan dan tanggung jawab untuk menemukan solusi, c) Mendorong pihak-pihak yang terlibat konflik untuk saling bekerja sama memecahkan perma-salahan secara tepat, dan d) Membuat semua pihak merasa tenang dan merasa diperlukan dan memerlukan satu sama lain.

Untuk itu, salah satu cara yang efektif dalam menyelesaikan konflik antara siswa-siswi dalam proses pembelajaran adalah dengan saling memposisikan dirinya pada peranan orang lain, sehingga akhirnya dapat dimengerti kenapa si Anu bertindak begini, dan mengapa si Buno bertindak begitu, dan seterusnya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan guru pola yang ditempuh dalam menyelesaikan konflik antara siswa-siswi dengan model: a) Membuat jadwal sesi tindak lanjut untuk mengkaji solusi yang dihasilkan, b) Memberikan tanggung jawab untuk melaksanakan solusi memerlukan komitmen yang kuat. Oleh sebab itu perlu dikaji solusi yang dihasilkan untuk

mengetahui tingkat keefektifan dari solusi tersebut. Wajar kalau seluruh kom-ponen dalam proses pembelajaran merindukan keadaan yang bebas dari konflik. Oleh karena itulah maka seluruh stakeholder di sekolah rindu akan kedamaian. Pola-pola yang ditentukan dalam menghindari konflik adalah melalui nasihat-nasihat untuk dapat diterapkan dalam konteks hubungan antar pribadi atau dalam konteks pelayanan. Karena waktu terbatas, guru akan berfokus pada konteks pelayanan, dan siswa dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam menjaga hubungan antar siswa.

Pada sisi lain, setiap konflik yang dialami siswa-siswi dalam proses pembelajaran ada sisi positifnya, menurut wawancara dengan guru menyebutkan bahwa; a) Membuktikan hidup dan daya hidup; b) Dapat memperbaharui motivasi; c) Memberi kesempatan untuk membicarakan dan mengatasi frustrasi-frustrasi yang mungkin ada tanpa disadari yang sudah lama mengganggu orang dan hubungan, d) Dapat memungkinkan pertumbuhan pribadi; e) Dapat juga menjadi kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan maju dalam pelayanan.

Oleh karena itu konflik yang terjadi juga mengandung unsur-unsur positif untuk terus maju. Kalau tidak ada konflik, maka tidak tahu kita untuk menyelesaikan suatu masalah, karena selama ini proses pembelajaran yang dilakukan lancar-lancar saja. Dengan adanya konflik tersebut sehingga guru perlu membenahi kembali apa yang salah dalam pembelajarannya. Konflik tidak dapat dihindari dalam setiap kehidupan proses pembela-ajaran di sekolah.

Oleh sebab itu guru dan siswa tidak mungkin menghindari konflik. Bila dalam proses pembelajaran guru atau siswa menghindari konflik atau masalah yang terjadi, maka akan terjadi perasaan sebal terus menumpuk, ketidakpuasan, gosip, dan fitnah akan tumbuh. Hasil wawancara dengan guru menyebutkan bahwa: Pada prinsipnya proses pembelajaran sudah jelas bahwa konflik tidak dapat dihindari, guru harus menentukan pola konflik yang akan dipakai. Ada pola-pola tertentu untuk mengatasi konflik, yaitu: berpikir, berbicara, dan/atau bertindak diambil dari pola-pola yang telah digariskan Al-Quran dan Al-Hadis yaitu bermusyawarah dan bermufakatlah kamu dengan seadil-adilnya. Itulah jalan yang terbaik bagi mu untuk berbuat adil.

#### 4) Penyelesaian Secara Damai

Pola Penyelesaian konflik di sekolah selalu dilakukan secara damai. Hasil wawancara dengan guru bahwa untuk penyelesaian konflik secara damai, guru terlebih dahulu harus mengetahui penyebab konflik yaitu: a) Perbedaan budaya, latar belakang, pendapat, pendekatan atau kepri-badian (sifat). Kepribadian mencakup perbedaan pribadi yang diciptakan Allah SWT (peka, tegas, serta kelemahan yang kadang-kadang berkaitan: sensitif, keras kepala, b) Idealistis lawan pragmatis; bersifat menurut kata hati, lawan lamban; riang lawan, orang yang ingin segalanya sempurna; teratur lawantidak teratur, c) Prasangka (bisa karena budaya atau latar belakang, tapi juga bisa karena masalah pribadi): sakit hati atau curiga terhadap seseorang atau suatu kelompok, dan d) Kealpaan; pilihan yang kurang bijaksana, perasaan tidak dihargai atau diperlakukan secara tidak adil, dan mementingkan diri sendiri

Oleh karena itu, bila guru mengetahui seluk beluk konflik maka cara damai mudah ditempuh untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar siswa. Hasil wawancara dengan guru bahwa penyelesaian konflik yang selama ini dilakukan adalah dengan cara damai. Guru terlebih dahulu menentukan hal-hal sebagai berikut; a) Menentu-kan perbedaan dalam nilai-nilai, kepercayaan, tradisi; tujuan, target; metode, strategi; fakta dan sumber fakta dan b) Menentukan perbedaan budaya (perilaku, keadaan keluarga, sikap sehari-hari dan lain-lain). Oleh sebab itu, penyelesaian konflik yang dilakukan guru secara damai antara lain: a) Mengusulkan bahwa masalah timbul karena salah komunikasi, b) Menjelaskan pengertian tentang salah komunikasi tanpa memberi kesan bahwa guru mempersalahkan siswa-siswa tertentu, c) Menghindari mis-komunikasi yang dapat menimbulkan rasa kurang percaya satu terhadap yang lain, dan d) Menghindari munculnya kecurigaan terhadap siswa yang dituduh atau terhadap yang lain yang dapat membayangkan motivasi yang buruk.

Penyelesaian konflik yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran adalah berusaha untuk memaklumi dengan sikap positif setiap kepribadian dan latar belakang siswa yang terlibat, dan menjelaskan apa yang ditangkap guru sudah dapat diambil dari pandangan siswa. Penyelesaian konflik yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran yang dilakukan di SMA Negeri 1 Mila Pidie selalu mengedepankan

perdamaian melalui: a) Menyatakan sikap siap untuk dikoreksi; dan b) Menganalisis perbedaan antara perspektif siswa bersalah (terdakwa) dan perspektif siswa (korban).

Dengan wawancara tersebut membuktikan bahwa penyelesaian konflik secara damai selalu ditempuh guru. Guru mengungkapkan dengan jelas (kalau masalahnya rumit, guru Pendidikan Kewarganegaraan bekerjasama dengan wali kelas dan guru lain) prinsip, nilai yang ditempuh di sini adalah saling setuju. Di samping itu wawancara dengan guru bahwa mengingatkan penyelesaian konflik masalah yang dilakukan secara damai membutuhkan hal-hal sebagai berikut; a) Menyetujui secara bersama untuk mendoakan perbedaan hal tersebut, dan minta hikmat dan jalan keluar dari Allah SWT, b) Berdoa masing-masing dan minta hikmat dan jalan keluar dari Allah swt. Data semua ide yang muncul sebagai jalan keluar yang mungkin dapat diterapkan, c) Menentukan hal-hal dari ide guru yang dapat ditawarkan dan hal-hal yang tidak dapat ditawarkan.

Sejalan dengan itu, pola penyelesaian konflik antar siswa-siswa sering dilakukan dengan jalan damai, sehingga solusinya dapat ditempuh secara mufakat dan musyawarah dengan tidak meninggalkan doa-doa yang dipanjatkan kepada Yang Maha Kuasa untuk memberikan jalan yang terbaik dalam pemecahan, misalnya konflik antara guru dengan siswa masalah kesalahan nilai, atau salah penafsiran dari orang tua terhadap nilai yang diberikan guru. Wawancara dengan guru menyebutkan bahwa penyelesaian secara damai sering dilakukan dengan model: a) Bertemu lagi untuk membicarakan hasil doa dan mencari bersama, dari antara semua kemungkinan, jalan terbaik yang ditunjuk Allah SWT. b) Jika ternyata ada hal-hal pokok yang bertentangan dan tidak rela ditawarkan dari kedua belah pihak, "setuju untuk tidak setuju" dalam hal-hal tersebut, dan c) Dengan persetujuan ini, kerja sama mungkin harus dibatasi, tetapi hubungan komunikasi dapat tetap jalan.

Sementara itu bahwa guru penyelesaian masalah konflik antar siswa dalam banyak hal, perbedaan pendapat diperbolehkan. Yang lebih penting daripada persoalan itu sendiri adalah sikap kita satu terhadap yang lain. Dalam hal yang tidak jelas dilarang/diwajibkan dan diperintahkan sekolah atau guru adalah jangan bertengkar atau saling menghakimi, melainkan setuju.

Pola penyelesaian konflik yang dilakukan guru adalah berusaha untuk mengerti dan

menghargai pola pikir, tingkah laku, nilai-nilai dan hal-hal yang dirasakan penting oleh siswa lain. Berusaha untuk berperilaku dan berkomunikasi dengan cara yang akan dipahami dan diterima oleh banyak orang. Kalau ada kealpaan, kekurangan, atau apa saja yang ada pada diri sendiri (guru), langsung akui hal tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Giatlah untuk melakukan hal ini, meskipun mungkin siswa merasa bahwa kekurangan orang lain jauh lebih besar daripada kekurangan dirinya sendiri. Hal ini membuktikan kerendahan hati, sikap, perilaku dan membuka pintu untuk penyelesaian yang baik.

#### 5) Kendala Penerapan Nilai-nilai Demokrasi dalam Proses Pembelajaran

Penerapan nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Mila Pidie, selalu diliputi oleh hambatan-hambatan yang ada, baik sarana dan prasarana, pengetahuan, maupun hambatan dari siswa, semuanya itu akan mempengaruhi penerapan demokrasi dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bahwa sebagian besar responden menyatakan kesulitan yang paling mendasar yang dirasakan guru dalam penerapan nilai-nilai demokrasi adalah pengetahuan akan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dan menyusun strategi pembelajaran yang tepat untuk siswa. Pengetahuan akan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai membutuhkan pengalaman dengan membaca, meneliti dan mengikuti pelatihan, karena penerapan nilai-nilai demokrasi merupakan sebuah teori yang memerlukan pengetahuan dan wawasan luas, maka sedikit sekali pengetahuan yang baru diperoleh. Oleh sebab itu proses pembelajaran demokrasi harus ada tugas-tugas yang diberikan kepada siswa agar proses pembelajaran sesuai dengan rencana.

Dengan merumuskan instrumen penilaian untuk mengetahui terserap tidaknya siswa diajarkan nilai-nilai demokrasi membutuhkan kecakapan yang memadai, dengan demikian apa yang diharapkan dari tes sesuai dengan keinginan yang diharapkan, dan sesuai pula dengan indikator. Dengan demikian instrumen yang disusun benar-benar dapat mengukur kemampuan siswa pada tahap yang sesungguhnya. Merumuskan indikator menurut guru Pendidikan Kewarganegaraan memerlukan pengetahuan yang memadai tentang kata-kata operasional, misalnya jangan sering dalam



indikator tersebut hanya ter-cantum menyebutkan, tetapi hendaknya beragam seperti menjelaskan, membandingkan, memberi contoh, mengidentifikasi, meng-analisis, menemukan, membedakan dan lain-lain. Wawancara lain dengan guru bahwa kendala yang paling mendasar dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi pada siswa adalah siswa yang kurang peka terhadap apa yang diberikan guru, kadang-kadang ada siswa setelah dijelaskan berulang kali ada yang belum paham tentang bagaimana nilai-nilai demokrasi yang sesungguhnya. Pada dasarnya siswa dalam proses pembelajaran sangat beragam, ada siswa yang sekali dijelaskan sudah mengerti, ada yang berulang-ulang dijelaskan baru mengerti dan ada pula payah dijelaskan oleh teman-temannya yang lain.

### **Pembahasan**

#### **1) Penerapan Nilai-Nilai Demokrasi; Toleransi, Kerjasama, dan Mufakat**

Penerapan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, kerjasama dan mufakat dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Mila Pidie dilakukan melalui pembelajaran tatap muka langsung, mengingat siswa terdiri dari berbagai watak dan perilaku ada yang penyabar, egois dan bahkan ada yang keras wataknya. Penerapan nilai toleransi kerjasama, dan mufakat dilakukan dengan cara: a) Membentuk pendidikan alternatif. Yaitu suatu bentuk pendidikan yang berusaha menjaga perbedaan siswa dan mengajarkan kepada mereka untuk menumbuhkan akan tata nilai dan prinsip-prinsip kebersamaan, b) Memupuk persahabatan antara siswa yang beraneka ragam tersebut, c) Mengembangkan sikap saling memahami satu sama lain, dan d) Mengajarkan keterbukaan dan dialog dalam diskusi kelas, menyelesaikan tugas-tugas kelompok secara bersama-sama.

Oleh karena itu, guru Pendidikan Kewarganegaraan telah menerapkan nilai-nilai toleransi dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan ungkapan Rosyada (2014:17) bahwa: Toleransi yang diterapkan adalah sabar membiarkan sesuatu. Toleransi secara luas adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya sikap diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat

diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah toleransi beragama dimana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, kerjasama dan mufakat yang diterapkan di SMA Negeri 1 Mila Pidie diyakini mempunyai peran besar dalam membentuk karakter setiap individu yang dididiknya dan mampu menjadi Penerang bagi generasi muda, terlebih melalui pendidikan kewarganegaraan. Penerapan nilai-nilai toleransi, kerjasama dan mufakat di SMA Negeri 1 Mila Pidie dilakukan untuk penyadaran siswa dalam membangun sikap keharmonisan antar siswa yang menjadi kebutuhan bersama dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan ungkapan Hikam (2015:21) sebagai berikut. Beberapa langkah dan strategis untuk memupuk jiwa toleransi, kerjasama dan mufakat: a) Menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama; tidak memperdebat-kan segi-segi perbedaan agama; b) Melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda; c) Mengubah orientasi pendidikan agama yang menekankan aspek sektoral fiqhiyah menjadi pendidikan agama yang berorientasi pada pengembangan aspek universal-rabbaniyah; d) Meningkatkan pembinaan individu yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur dan akhlakul karimah, dan e) SMA Negeri 1 Mila Pidie menghindari jauh-jauh sikap egoism dalam beragama sehingga mengklaim diri yang paling benar.

Uraian di atas menggambarkan bahwa nilai-nilai toleransi, mufakat dan kerjasama sangat strategis dilakukan untuk menghindari benturan-benturan dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan dapat tercapai. Guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Mila Pidie telah menerapkan nilai toleransi, kerjasama dan mufakat dalam proses pembelajaran melalui; a) membangun keberagaman peserta didik untuk tidak mempermasalahkannya, b) memberikan kemungkinan keterbukaan untuk mempelajari dan tidak mempermasalahkan orang lain sebatas untuk menumbuhkan sikap toleransi, kerjasama dan mufakat, c) berdiskusi harus menghormati dan toleransi terhadap pendapat orang lain walau pendapat itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Lebih lanjut Suparno (2014: 19) mengungkapkan bahwa: Pendidikan multikultural menjadi tanggung jawab kita

bersama, tidak hanya di lingkup sekolah tapi juga di rumah dan lingkungan sosial dengan menanamkan dalam benak pikiran siswa dan anak-anak kita, bahwa perbedaan merupakan sunnatullah yang harus dijalani, semua sudah ada yang mengatur, maka, tidak selayaknya kita lari dari tanggungjawab. Mari memupuk dan kembangkan pendidikan multikultural dan toleransi dalam wadah pembelajaran.

Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai toleransi di SMA Negeri 1 Mila Pidie sangat diutamakan sebab; nilai-nilai tersebut secara aktual merupakan ikatan yang terpenting dalam kehidupan siswa. Nilai-nilai toleransi merupakan kesediaan siswa untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam pergaulan antar siswa, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat, serta aktifitas yang dilakukan oleh siswa/kelompok lain. Pada prinsipnya nilai toleransi, kerjasama dan mufakat yang diterapkan di SMA Negeri 1 Mila Pidie merupakan bentuk nilai tertinggi, bahwa siswa dapat mencapai keberhasilan karena adanya toleransi. Toleransi, kerjasama dan mufakat dapat menjadi kenyataan ketika kita mengasumsikan adanya perbedaan. Sehingga dalam toleransi, kerjasama dan mufakat tidak harus selalu mempertahankan keyakinannya, pendapatnya. Untuk mencapai tujuan sebagai manusia Indonesia yang demokratis dan dapat hidup di Indonesia diperlukan pendidikan multikultural.

## 2) Penerapan Unsur-Unsur Keberagaman

Pada prinsipnya proses pembelajaran di sekolah sebagai guru Pendidikan Kewarganegaraan juga telah menerapkan unsur-unsur keberagaman melalui item-item materi yang dipelajari siswa. Guru menyuruh siswa untuk berdiskusi sesamanya. Dari diskusi siswa dapat mengetahui dan memahami tentang pentingnya keberagaman budaya yang merupakan aset kekayaan bangsa Indonesia ini yang harus diperkenalkan kepada generasi muda, para siswa, melalui pengajaran, khususnya pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang memuat nilai-nilai demokrasi. Berdasarkan hasil paparan di atas membuktikan bahwa dalam proses pembelajaran unsur-unsur keberagaman yang diterapkan merupakan unsur pokok untuk mencegah timbulnya disintegrasi bangsa. Hal ini sejalan dengan ungkapan Moeyono, Anton (2014:21) menjelaskan bahwa: “Suku bangsa yang menempati wilayah Indonesia dari sabang

sampai merauke sangat beragam. Sedangkan perbedaan ras muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri-ciri biologis lahiriah yang sama seperti rambut, warna kulit, ukuran tubuh, mata, ukuran kepala, dan lain sebagainya.”

Penerapan unsur-unsur keberagaman yang diajarkan guru dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Mila Pidie, sangat ditekankan bagaimana unsur-unsur keberagaman tersebut menjadi pilar utama untuk menghormati orang lain dan mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat. Lebih lanjut John Potter dalam Rosyada (2014:10) mengungkapkan sebagai berikut. Substansi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berisikan tentang hak-hak kita, tetapi harus diakui memiliki tiga keunikan yang membedakannya dengan mata pelajaran lain; a) Sekolah harus mendukung secara eksplisit untuk mengkaitkan Pendidikan Kewarganegaraan dengan mata pelajaran yang lain; b) Pendidikan Kewarganegaraan harus mengakar dalam pandangan hidup dan etos sekolah secara keseluruhan; dan c) Pendidikan Kewarganegaraan memerlukan generasi muda untuk belajar melalui partisipasi dan pengalaman nyata.

Oleh sebab itu, keragaman dalam pembelajaran di sekolah adalah suatu kondisi dalam kehidupan siswa di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama budaya, agama dan ideologi, adat kesopanan, serta situasi ekonomi. Melalui pembelajaran unsur-unsur keberagaman ini siswa dituntut untuk memiliki kesederajatan, artinya sama tingkatan, persepsi dan pandangan. Dengan demikian konteks kesederajatan di sini adalah suatu kondisi di mana dalam perbedaan dan keragaman yang ada manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama dan satu tingkatan hierarki.

Untuk itu guru di SMA Negeri 1 Mila Pidie telah menerapkan unsur-unsur keberagaman dalam proses pembelajaran dilakukan untuk: menentukan perilaku kolektif kebangsaan bagi yang khas-baik yang tecermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI. Unsur-unsur keberagaman yang diajarkan untuk memberikan hak dan kewajiban, mau mengambil tanggung jawab dalam setiap tugas-tugas kelompok yang diberikan kepada

siswa. Tugas-tugas tersebut dikerjakan secara bersama-sama tidak memandang yang satu bodoh dan yang satu pandai, tetapi dalam kelompok itu kedudukannya sama, disadari bahwa penerapan unsur-unsur keberagaman dalam proses pembelajaran di sekolah untuk menanamkan kepada siswa bahwa Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan bermacam tingkat, pangkat, dan strata sosial yang hierarkis. Hal ini dapat terlihat dan dirasakan dengan jelas yaitu adanya penggolongan orang berdasarkan pangkat dan kedudukan. Hal inilah yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang tidak saja dapat menyakitkan, namun juga membahayakan bagi kerukunan masyarakat.

### 3) Pola Penyelesaian Konflik Antar Siswa

Pola penyelesaian konflik antar siswa-siswi di SMA Negeri 1 Mila Pidie dilakukan dengan cara mengakui adanya konflik. Langkah ini merupakan langkah awal untuk menyelesaikan konflik secara dini. Tanpa adanya pengakuan secara sadar bahwa telah terjadi konflik maka masalah tidak akan pernah terselesaikan, dan mengidentifikasi konflik yang sebenarnya.

Untuk itu dapat disimpulkan bahwa guru telah menempuh pola-pola penyelesaian dengan prinsip demokrasi. Hal ini sejalan dengan ungkapan Suteng (2014:7) bahwa; Pendapat yang saling bertentangan. Pertama, muncul di lingkungan penganut paham demokrasi liberal yang menentang sekolah dijadikan sebagai instrumen sosialisasi politik yang dapat memunculkan suatu konflik atau masalah yang menguntungkan penguasa. Sebab, pendidikan akan menghasilkan lulusan yang tidak memiliki kemandirian dan cenderung menjadi robot. Menurut kelompok ini pendidikan harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mengembangkan watak demokratis, meningkatkan daya kritis, mendorong semangat untuk mengejar pengetahuan dan senantiasa menjunjung harkat dan martabat manusia. Kedua, menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu instrumen untuk mengembangkan kesadaran, sikap dan perilaku politik dengan harapan siswa menjadi warga masyarakat yang baik.

Karena itu sekolah merupakan lembaga yang tepat dalam menentukan pola-pola penyelesaian masalah (konflik). Sesungguhnya penyelesaian konflik yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan untuk

menerapkan prinsip demokrasi dan pendidikan, keduanya, saling berkaitan satu sama lain dan mempunyai bubungan timbal balik. Misalnya: pendidikan jika dimaknai suatu proses bantuan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik, maka pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis (sering disebut dengan istilah demokrasi pendidikan). Guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMK Negeri 1 Mila Pidie telah menyelesaikan konflik antar siswa dengan berpola mendengarkan semua pendapat atau sudut pandang dari siswa yang terlibat, memberi nasihat pada siswa yang bersalah dan lain-lain. Untuk menyelesaikan konflik antar siswa telah mempunyai pola-pola tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Suparno (2014:7) mengutarakan sebagai berikut. Pendidikan demokratis mempunyai ciri adanya suasana belajar yang berkemampuan optimal menumbuhkan potensi peserta didik untuk tujuan tertentu. Begitu juga sebaliknya, agar nilai-nilai demokrasi hak-hak asasi, kebebasan, keadilan, persamaan dan keterbukaan dapat dipahami dan memiliki peserta didik, maka perlu pendidikan.

Dengan pendidikan diarahkan anak didik untuk tidak menimbulkan konflik antar sesama mereka. Siswa dapat menentukan pilihan yang mana dipilih agar tidak berbenturan dengan siswa-siswa yang lain, alternatif apa yang dipakai untuk bertindak agar tidak menimbulkan konflik baik dengan guru maupun antar siswa. Siswa dapat menyebutnya sebagai identifikasi masalah. Konflik dapat muncul dari sumber atau akar masalah tertentu, namun masalah tersebut menjadi konflik bila tidak dikelola dengan emosi yang baik.

### 4) Penyelesaian Dilakukan Secara Damai

Pada prinsipnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Mila Pidie penyelesaian konflik antar siswa dilakukan secara damai dan demokratis. Guru terlebih dahulu harus mengetahui penyebab konflik yaitu: a) Perbedaan budaya, latar belakang, pendapat, pendekatan atau kepribadian (sifat). Kepribadian mencakup perbedaan pribadi (peka, tegas, serta kelemahan yang kadang-kadang berkaitan: sensitif, keras kepala); b) Idealistis lawan pragmatis; bersifat menurut kata hati, lawan lamban; riang lawan, orang yang ingin segalanya sempurna; teratur lawan tidak teratur; c) Prasangka (bisa karena budaya atau latar belakang, tapi juga bisa karena masalah pribadi): sakit hati atau curiga terhadap seseorang atau

suatu kelompok; d) Kealpaan; pilihan yang kurang bijaksana, perasaan tidak dihargai atau diperlakukan secara tidak adil, dan mementingkan diri sendiri. Bila guru telah mengetahui penyebab konflik, maka penyelesaian-nya mudah dilakukan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai tugas yang banyak, yang salah satunya adalah menyelesaikan konflik antar siswa secara demokratis. Hal ini sejalan dengan ungkapan Hikam (2015:17) bahwa: Wariskan budaya-budaya bangsa kepada geberasi muda seperti budaya saling menghormati antarsesama, tidak saling sikat-sikut diantara teman, dan tidak saling mengejek bila suatu pendapat tidak diterima. Budaya menghormati perlu disisipkan dan dikembangkan dalam setiap kegiatan di sekolah baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun di luar kegiatan belajar mengajar.

Untuk itu, budaya-budaya seperti dalam kutipan tersebut diterapkan di sekolah maka konflik antar siswa dan guru tidak akan terjadi. Selanjutnya Hikam (2015:18) menjelaskan kembali bahwa menghormati di luar kegiatan belajar mengajar juga perlu sebagai langkah awal untuk menyelesaikan konflik yang timbul seperti: a) Menyapa guru dan teman saat berpapasan, b) Mengikuti upacara bendera dengan khidmat, c) Menggunakan tutur bahasa yang baik, benar dan sopan, d) Memprioritaskan musyawarah kelas untuk memutuskan kebijakan-kebijakan berhubungan dengan kepentingan kelas, dan Tidak membedakan teman.

Oleh sebab itu yang dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik di SMA Negeri 1 Mila Pidie telah sesuai dengan nilai-nilai demokrasi pada umumnya, yaitu selain menghormati, sikap demokratis yang perlu dimiliki adalah rasa tanggung jawab. Dalam hal pengambilan keputusan, siswa harus dilatih memutuskan dan melaksanakan keputusan secara bertanggung jawab. Dalam mengajarkan hal ini kepada siswa guru sebaiknya memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari di dalam kelas, misalnya dalam pemilihan ketua kelas. Langkah pertama untuk menyelesaikan sebuah masalah di sekolah adalah sangat tergantung pada manajemen kelas itu sendiri, yaitu ketua kelas. Setelah terpilih menjadi ketua kelas, selanjutnya ketua kelas itu mengatur kelasnya masing-masing. Lebih lanjut Widodo (2014:12) menjelaskan sebagai berikut; a) Ketua kelas: mengadakan rapat kelas yang dipimpin

ketua kelas. Dalam rapat ketua kelas akan mendapat banyak saran, pendapat, dan tidak tertutup kemungkinan pendapat tadi ada yang bertentangan dengan pendapatnya. Pendapat tadi kemudian dibicarakan dalam rapat secara musyawarah, dengan perimbangan yang disepakati sejujur-jujurnya dan penuh tanggung jawab melaksanakan keputusan yang diambil secara bersama itu, b) Hasil keputusan tersebut harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap siswa dan keputusan yang berupa peraturan itu harus dibuat secara tertulis, sehingga setiap siswa dapat mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sehingga apabila siswa melanggar mereka akan melaksanakan sanksi tersebut secara konsekwen dan penuh kesadaran, c) Setiap siswa harus mengetahui tugasnya masing-masing, siapa yang bertugas merapikan meja, siapa yang bertugas mengambil dan menyiapkan kapur, penghapus, dan sebagainya. Selain itu guru juga harus menjadi contoh dalam pengembangan sikap saling menghormati. Guru harus mampu menunjukkan sikap menghormati sekalipun pada orang yang lebih muda. Misalnya dalam menghadapi siswa yang melakukan kesalahan harus diberi kesempatan melakukan pembelaan diri. Jangan memosisikan siswa sebagai pihak yang paling bersalah sehingga harus menerima sanksi tanpa melakukan kontrak sosial bersama siswa.

#### 5) Kendala yang Dialami

Adapun kendala yang dirasakan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam penerapan nilai-nilai demokrasi adalah pengetahuan tentang strategi dan metode pembelajaran yang tepat. Guru sering berceramah, membuat siswa bosan kurang respon terhadap pembelajaran yang dilakukan guru. Djamarah dan Zain (2013) menjelaskan kelemahan metode ceramah yaitu: a) Mudah menjadi verbalisme (pengertian kata-kata), b) Yang visual menjadi rugi, yang auditif (mendengar) lebih besar menerimanya, c) Bila selalu digunakan dan terlalu lama, membosankan, d) Guru menyimpulkan bahwa siswa mengerti dan tertarik pada ceramahnya, ini sukar sekali, dan e) Menyebabkan siswa menjadi pasif.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran berjalan kurang sesuai dengan prinsip pembelajaran kooperatif. Bila ceramah selalu digunakan dan terlalu lama digunakan dapat membuat bosan siswa, keberhasilan metode ini sangat bergantung pada siapa

yang menggunakannya, dan cenderung membuat siswa pasif dan cenderung menerima saja apa yang dijelaskan guru.

Sementara itu kendala lain yang dialami guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam penerapan nilai-nilai demokrasi adalah program pengajaran tidak bisa terlaksana sesuai dengan jadwal yang ditentukan, metode mengajar yang digunakan tidak sesuai dengan rencana pembelajaran. Sering siswa beranggapan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak terlalu penting, sebab pelajaran ini tidak ada Ujian Nasional, dan ada anggapan lain dari siswa bahwa pelajaran ini hanya sekedar pelengkap.

### **Kesimpulan**

Sebagaimana pembahasan telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penerapan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, kerjasama, dan mufakat dilakukan dengan pola pembentukan pendidikan alternatif, yaitu pendidikan yang berusaha menjaga perbedaan siswa dan mengajarkan kepada mereka untuk menumbuhkan tata nilai dan prinsip-prinsip kebersamaan, mupuk persahabatan antara siswa-siswi yang ber-aneka ragam, mengembangkan sikap saling memahami satu sama lain, dan mengajarkan keterbukaan dan dialog dalam diskusi kelas, menyelesaikan tugas-tugas kelompok secara bersama-sama. Sementara yang lain, penerapan unsur-unsur keberagaman dilakukan melalui item-item materi yang dipelajari siswa-siswi melalui ceramah dan diskusi yang membahas tentang kekayaan budaya yang mewarnai kesatuan bangsa yang ditandai dengan mottonya, bhineka tunggal ika. Karena itu keragaman budaya yang diperkenalkan kepada siswa, memuat nilai-nilai demokrasi. Dalam diskusi tersebut dibahas gejala disintegrasi bangsa yang muncul memperlihatkan dampak negatif terhadap kesatuan dan persatuan bangsa yang telah dihasilkan oleh para pendahulu bangsa ini. Selanjut itu pola penyelesaian konflik antar siswa di SMA Negeri 1 Mila Pidie dilakukan dengan cara mengakui adanya konflik dan mengidentifikasi konflik yang sebenarnya.

Sekolah merupakan lembaga yang tepat dalam menentukan pola-pola penyelesaian konflik. Sementara yang lain, proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Mila Pidie menyelesaikan konflik antar siswa-siswi dilakukan secara damai dan demokratis. Guru terlebih dahulu mengetahui penyebab konflik antara lain :

- a. Perbedaan budaya, latar belakang, pendapat, pendekatan atau kepribadian. Kepribadian mencakup perbedaan pribadi; peka, tegas, serta kelemahan yang kadang-kadang berkaitan; sensitif, keras kepala;
  - b. Idealistik; bersifat menurut kata hati, lawan lamban; riang lawan, orang yang ingin segalanya sempurna; teratur lawan tidak teratur;
  - c. Prasangka; bisa karena budaya atau latar belakang, tapi juga bisa karena masalah pribadi; sakit hati atau curiga terhadap seseorang atau suatu kelompok; d) Kealpaan; pilihan yang kurang bijaksana, perasaan tidak dihargai atau diperlakukan secara tidak adil, dan mementingkan diri sendiri.
2. Kendala yang dialami dan dirasakan guru dalam penerapan nilai-nilai demokrasi adalah metode ceramah hal ini dianggap bahwa dapat membuat pembelajaran membosankan siswa-siswi.

### **Saran-Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas maka dapat diuraikan saran-saran sebagai berikut:

1. Guru diharapkan dalam proses pembelajaran selalu mengutamakan nilai-nilai demokrasi, sehingga proses pembelajaran berikutnya dapat dijadikan pedoman ke arah yang lebih efektif dan efisien. Untuk siswa-siswi hendaknya dalam proses pembelajaran demokrasi lebih pro aktif untuk mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi baik dalam mengambil suatu keputusan, kebijakan, menyelesaikan konflik dan lain-lain, sehingga pencapaian tujuan pembelajaran lebih bermakna yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Diharapkan penyelesaian konflik antar

siswa dalam proses pembelajaran dilakukan dengan meng-edepankan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga konflik tidak berkepanjangan dan tidak merugikan semua pihak baik yang terlibat maupun yang tidak terlibat.

2. Konflik antar siswa-siswi maupun guru hendaknya dapat diminimalisir atau dihilangkan sesuai dengan kapasitas yang ada sehingga tujuan akhir dari pembelajaran tercapai sesuai rencana, selain itu guru tidak saja menggunakan metode ceramah, tetapi hendaknya secara bervariasi dengan model-model pembelajaran, dengan model belajar sambil bermain sehingga pembelajaran lebih bermakna dan tidak membosankan siswa-siswi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Degeng, Nyoman. 2016. Paradigma Membangun Kewibawaan Guru dalam Pengembangan Profesi di Era Global. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Universitas PGRI Adibuana, Madiun, 10 Oktober 2016.
- Bogdan, Robert dan Biklen, Sari Knopp. 2014. *Qualitative Research for Education An Introduction to Theory Methods*, Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Djamarah, dan Zain Asawan, 2013. *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Budirardjo, Miriam. 2015. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Kasmiran. dkk. 1996. *Filsafat Manusia*, Jakarta: Erlangga.
- Widodo. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Filsafat Pancasila*. Malang: Universitas Wisnuwardana.
- Hikam, Mohammad AS. 2015. *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES.
- Moelyono, Anton M. dkk 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- John Potter, Rosdaya dkk. 2015. *Modul Strategi Belajar Mengajar*, Banda Aceh: FKIP Unsyiah.
- MPR Republik Indonesia. 2015. *Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Rosyada, Dede. 2014. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Prenada Media
- Rusyan, A. Tabrani. 2013. *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Karya.
- Nasution, S. 2014. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Sparingga, Daniel. 2013. *Paradigma Baru Pengemasan Pendidikan yang Demokratis Ditinjau dari Segi Sosiologi*. Malang: IPTP.
- Suparno, Paul. 2014. *Guru Demokratis di Era Reformasi*. Jakarta: Gramedia.
- Surakhmad, Winarno. 2003. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito.
- Suteng, Bambang. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan, Untuk SMA Kelas XI*, Jakarta: Erlangga.
- Tim Penyusun. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Blitar: Karya Muda
- Wuryo, Kasmiran. dkk. 2013. *Filsafat Manusia*, Jakarta: Erlangga.
- Widodo. 2014. *Pendidikan Pancasila dan Filsafat Pancasila*. Malang: Universitas Wisnuwardana.